

BAB III

MENGENAL LOKASI PENELITIAN DAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

A. Gambaran Umum lokasi penelitian

1. Keadaan Geografis dan Administrasi Pemerintah

Kabupaten Daerah tingkat II Lombok Barat merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kabupaten / kota madya daerah tingkat II di propinsi Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan letak geografisnya adalah $115^{\circ} - 46'$ - $116^{\circ}28'$ bujur timur dan $8^{\circ}12'$ - $8^{\circ}55'$ lintang Selatan. Kedudukan kabupaten Lombok Barat adalah di bagian Barat dari pulau Lombok, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- sebelah Utara : laut Jawa
- sebelah Selatan : samudera Indonesia
- sebelah Barat : selat Lombok dan kodya Mataran
- sebelah Timur : kabupaten Lombok Tengah.

Untuk lebih jelasnya, maka letak geografis kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada peta administrasi kabupaten Lombok Barat yang terlam-

pir.

Ibu kota kabupaten Lombok Barat sampai dengan saat ini masih bergabung dengan ibu kota kodya (kota madya) Mataram dan ibu kota propinsi Nusa Tenggara Barat yang dapat dikatakan sebagai pusat segala kegiatan, yaitu kota Mataram.

Sedangkan wilayah kabupaten Lombok Barat luasnya adalah 167.215 Ha. atau 1672,15 km², yang terdiri dari 9 kecamatan dengan 65 desa (termasuk desa persiapan yaitu desa persiapan Pelangan, desa persiapan Buwun Mas, desa persiapan Lembar, desa persiapan Gili Indah dan desa persiapan Senaru) serta 520 dusun.

Luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel I di bawah ini :

TABEL I
Luas wilayah kabupaten Lombok Barat
dirinci menurut kecamatan

no.	kecamatan	luas wilayah		%
		km ²	Ha.	
1	Sekotong	380,35	38.035	22,75
2	Gerung	83,08	8.308	4,97

3	Labuapi	28,33	2.833	1,69
4	Kediri	43,20	4.320	2,58
5	Narmada	204,20	20.420	12,21
6	Gunung Sari	123,85	12.385	7,41
7	Tanjung	196,73	19.673	11,77
8	Gangga	246,31	24.631	14,73
9	Bayan	366,10	36.610	21,89
jumlah =		1672,15	167.215	100 %

(sumber data : Bappeda kabupaten Lombok Barat)

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa wilayah kecamatan yang terluas adalah kecamatan Sekotong yaitu 380,35 km² atau 22,75 % dari luas wilayah kabupaten Lombok Barat. Sedangkan luas wilayah yang paling kecil adalah kecamatan Labuapi yaitu 38,33 km² atau 1,69 % dari luas wilayah kabupaten Lombok Barat.

Dan dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada, kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 3 wilayah pembangunan (WP) yaitu :

- a. Wilayah pembangunan Utara, yang terdiri dari kecamatan Bayan, Gangga dan Tanjung.
- b. Wilayah pembangunan Tengah, yang terdiri dari kecamatan Gunung Sari, Narmada, Kediri dan Labuapi.
- c. Wilayah pembangunan Selatan, yang terdiri

dari kecamatan Gerung dan Sekotong.

2. Keadaan Demografis

Mengenai keadaan demografis kabupaten Lombok Barat, penduduk kabupaten ini berjumlah : 591.843 jiwa yang terdiri dari 291.490 (44 %) jiwa laki-laki dan 299.651 (56%) jiwa perempuan.

Dan untuk lebih jelasnya, pembagian penduduk kabupaten Lombok Barat menurut jenis kelamin yang dirinci perkecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL II

Penduduk Lombok Barat dirinci menurut jenis kelaminnya perkecamatan

no.	kecamatan	penduduk (jiwa)	
		laki-laki	perempuan
1	Sekotong	24.811	25.072
2	Gerung	37.795	39.795
3	Labuapi	21.573	22.502
4	Kediri	33.300	34.792
5	Narmada	57.185	59.182
6	Gunung Sari	38.639	39.914
7	Tanjung	29.992	30.324

8	Gangga	26.636	26.698
9	Bayan	21.471	21.372
jumlah =		291.490	299.651

(sumber data : Kantor cabang Statistik Lombok Barat)

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan -
 oanwa jumlah penduduk kabupaten Lombok Barat
 sebagian besarnya adalah perempuan. Wilayah
 kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah
 kecamatan Narmada yang berjumlah 57.185 jiwa
 laki-laki dan 59.182 jiwa perempuan. Sedangkan
 untuk wilayah kecamatan yang paling sedikit
 penduduknya adalah kecamatan Bayan, dimana jum -
 lah laki-lakinya 21.471 jiwa, dan jumlah perem -
 puannya 21.372 jiwa.

3. Keadaan Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Lombok Barat telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggemirakan. Salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun pendapatan perkapita serta pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah maupun antar masyarakat yang menerima pendapatan. Dari hasil perhitungan sementara yang telah dilaksanakan,

PDRB kabupaten daerah tingkat II Lombok Barat pada tahun 1995 (atas dasar harga konstan 1983) tercatat sebesar Rp. 224.149.211.000,- atau meningkat sebesar 7,94 %, sedangkan PDRE (atas dasar harga berlaku) tercatat sebesar Rp. 540.138.078.000,- atau meningkat 16,43 % bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Apabila dilihat struktur perekonomian, maka sektor pertanian masih tetap dominan, ini dapat dilihat dari perannya dalam pembentukan PDRB (ADHB 1983) sebesar 45,25 % pada tahun 1994 dan dapat diturunkan menjadi 43,30 % pada tahun 1995. Sementara sektor-sektor lainnya di luar pertanian mengalami peningkatan, seperti industri dari 3,24 % menjadi 3,29 %, pengangkutan dan komunikasi dari 12,99 % menjadi 14,48 %, perdagangan, hotel dan restoran dari 19,51 % menjadi 20,16%.

Disamping hal tersebut di atas, indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan adalah tingkat kemakmuran yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diukur dengan ketimpangan pendapatan perkapita antar kecamatan di seluruh kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh besar ketimpangan pada tahun 1994 adalah 0,198 dan

pada tahun 1995 menurun menjadi 0,189. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dari tahun ke tahun semakin kecil, yang berarti bahwa pembagian pendapatan perkecamatan di wilayah kabupaten Lombok Barat semakin merata. (keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah tingkat II Lombok Barat, masa tugas 1995/1996)

Masyarakat kabupaten Lombok Barat apabila dilihat dari segi mata pencahariannya, sebagian besar adalah pertanian yang tercatat ada 267.098 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL III

Mata pencaharian penduduk
kabupaten Lombok Barat

no.	Mata pencaharian	jumlah (orang)	%
1	Pertanian	267.098	45,13
2	Pertambangan	6.345	1,1
3	Industri	47.812	8,1
4	Listrik / Air	836	0,1
5	Bangunan	19.052	3,2
6	Perdagangan	74.592	12,6
7	Angkutan	24.398	4,1

8	Keuangan	14.221	2,4
9	Jasa-jasa	70.127	11,8
10	Lain-lain	67.362	11,4
jumlah =		591.843	100 %

(sumber data : Buku saku Kabupaten Dati II Lombok Barat)

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, mengingat hal tersebut menyangkut perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM) dari suatu bangsa, untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna mendapatkan mutu pendidikan yang diharapkan.

Sarana pendidikan yang ada di kabupaten Lombok Barat mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri maupun swasta. Sedangkan untuk perguruan tinggi (PT) di kabupaten Lombok Barat belum ada sejak terpisahnya dengan kota madya Mataram pada akhir Pelita V.

Pendidikan formal yang ada di kabupaten Lombok Barat dari Taman-Kanak-kanak sampai

Sekolah Menengan Atas dapat dilihat pada tabel di bawan ini :

TABEL IV

Data lembaga pendidikan formal di kabupaten Lombok Barat tahun 1994/1995

no. kecamatan	Pendidikan Dasar								Pend. Mene- ngah Atas			
	TK		SD		MIDP		SLTP		PK		N-PK	
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1 Sekotong	-	-	51	-	-	6	2	-	-	-	-	-
2 Gerung	-	4	60	-	-	9	3	-	-	-	-	35
3 Labuapi	-	2	29	-	-	7	2	-	-	-	-	12
4 Kediri	-	9	46	-	-	9	3	-	1	1	-	68
5 Narmada	-	11	81	-	-	18	5	3	1	2	-	15
6 Gunung Sari	-	3	52	-	-	12	4	1	1	-	-	34
7 Tanjung	-	6	51	-	-	4	1	1	1	1	-	12
8 Gangga	-	6	40	-	-	10	3	-	1	-	-	1
9 Bayan	-	1	28	-	-	11	2	-	-	-	-	27
jumlah =	-	42	438	-	-	86	22	5	6	4	-	204

(Sumber data : Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat)

Keterangan: TK = Taman Kanak-kanak

SD = Sekolah Dasar

- MIDP = Madrasah Ibtidaiyah Departemen -
Agama.
- SLTP = Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- PK = Pendidikan dan Kebudayaan.
- N-PK = Non-Pendidikan dan Kebudayaan.
- N = Negeri.
- S = Swasta.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah Taman Kanak-kanak 42 buah yang tersebar di 9 kecamatan se kabupaten Lombok Barat dan seluruhnya swasta, jumlah Sekolah Dasar Negeri 438 buah dan Madrasah Ibtidaiyah swasta 86 buah, jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas terdiri dari 6 buah Negeri dan 4 buah swasta yang bernaung di bawah Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara yang Non-Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 204 buah swasta.

Dari keterangan di atas telah jelas bahwa sarana pendidikan yang tersedia cukup memadai. Akan tetapi kesemuanya ini tidak mempunyai arti sama sekali apabila tidak adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menimba pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah.

Masyarakat Lombok Barat sendiri yang telah mengenyam bangku sekolah sebesar 51,03 % dari penduduk yang berusia 3 sampai dengan 18 tahun

dan rata-rata mereka sekolah hanya merasakan
bangku Sekolah Dasar (SD). Dan untuk rincinya
dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL V
Keadaan Sosial Pendidikan

no.	jenjang Pend.	Usia	jml. penduduk.	jml. murid
1	T K.	3 - 5	53.176	1.379
2	S D /sederajat	7 - 12	100.963	98.210
3	S L T P.	13 - 15	46.683	18.238
4	S L T A.	16 - 18	43.070	6.634

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari jumlah penduduk 243.892 jiwa yang berusia 3 sampai 18 tahun, hanya 124.461 jiwa (51,03 %) yang sekolah, dan sebagian besar dari mereka hanya merasakan bangku Sekolah Dasar (SD).

Sedangkan untuk pendidikan luar sekolah di kabupaten Lombok Barat ditempuh melalui pembinaan kejar paket A "Unicef" dalam 24 kelompok yang meliputi 700 warga belajar. Dan untuk paket A "biasa" dilaksanakan melalui 201 kelompok yang meliputi 6000 warga belajar.

Salah satu pelaksanaan strategi terpadu-melalui pendidikan luar sekolah adalah dikait -kannya peningkatan peranan dan wawasan kalangan ibu-ibu rumah tangga (wanita), sekaligus untuk memperkecil angka kematian bayi dan meningkatkan umur harapan hidup.

5. Keadaan Agama

Di kabupaten Lombok Barat mayoritas penduduknya beragama Islam. Kecenderungan bahwa mes -jid / mushalla dan langgar merupakan kebutuhan utama dalam peribadatan membuat mereka untuk selalu mengadakan sarana tersebut di setiap pemukiman.

Selain agama Islam, di Lombok Barat juga berkembang agama-agama lainnya seperti; Hindu , Budha, protestan dan Katholik. Pemeluk agama Islam berjumlah 548.367 jiwa (93,21 %), sedang -kan agama yang jumlah pemeluknya sedikit adalah agama Katholik yaitu 171 jiwa (0,02 %). Berda -sarkan data yang diperoleh dari kantor Departe -men Agama kabupaten Lombok Barat, jumlah pemeluk agama sampai dengan tahun 1994/1995 , dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jumlah pemeluk berdasarkan Agama
di kabupaten Lombok Barat

no.	Kecam.	Islam	Prot.	Kath.	Hindu	Budha
1	Sekotong	46.117	23	10	3.438	5
2	Gerung	71.259	-	30	5.337	-
3	Labuapi	43.417	7	7	577	13
4	Kediri	63.638	3	-	4.371	-
5	Narmada	107.583	118	85	8.657	85
6	G. Sari	76.446	24	11	685	-
7	Tanjung	48.474	-	9	7.840	3.932
8	Gangga	49.908	10	12	884	2.498
9	Bayan	41.525	23	7	1.035	151
jumlah =		548.367	208	171	32.824	6.684

(Sumber data : Kantor Departemen Agama kabupaten Lombok Barat)

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa pemeluk agama Islam yang paling banyak berada di wilayah kecamatan Narmada yang berjumlah 107.583 jiwa. Pemeluk agama Protestan, Katolik dan Hindu yang paling banyak berada di wilayah kecamatan Narmada, dan untuk pemeluk agama Budha sebagian besar berada di wilayah kecamatan Tanjung.

Untuk meningkatkan ibadah penduduk beragama di kabupaten Lombok Barat tersebut, maka perlu juga dibangun sarana-sarana peribadatan - yang sampai dengan tahun 1994/1995 (setelah pisan dengan kota madya Mataram) berjumlah 1989 buah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Masjid : 751 buah.
- b. Langgar : 625 buah.
- c. Mushalla : 488 buah.
- d. Gereja : 1 buah.
- e. Pura : 123 buah.
- f. Vihara : 1 buah.

(Sumber data : Kantor Departemen Agama kabupaten Lombok Barat)

B. Pariwisata di kabupaten Lombok Barat

1. Perkembangan Pariwisata di kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah tingkat II di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi daerah tujuan wisata, karena memiliki obyek wisata yang potensial antara lain kawasan pantai Senggigi, kawasan wisata di 3 (tiga) Gili, yakni; Gili Air, Gili Trawangan dan Gili Meno, obyek wisata taman Narmada serta berbagai macam obyek wisata lainnya.

Perkembangan pariwisata di kabupaten Lombok Barat dalam lima tahun terakhir ini sangat

pesat sekali, ini dapat dilihat dari derasnya arus wisatawan yang datang ke Lombok Barat, berkembangnya pembangunan sarana akomodasi yang ada, berkembangnya obyek-obyek wisata, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah kabupaten Lombok Barat, dan meningkatnya sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Derasnya arus wisatawan yang datang ke kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan, baik sebelum berpisahnya kabupaten Lombok Barat dengan kota madya Mataram atau setelah berpisah. Dan untuk lebih jelasnya data tentang arus wisatawan ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL VII

Perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di kabupaten Lombok Barat

no.	Tahun	Wisatawan		jumlah	keterangan.
		Mancagera	Nusantara		
1	1991	93.110	72.003	165.113	
2	1992	104.618	74.517	179.135	
3	1993	114.061	76.694	190.756	
4	1994	119.456	24.044	143.500	terpisan dengan -
5	1995	127.556	36.632	164.118	Kodya Ma taram

(Sumber data: Dinas Pariwisata Daerah kabupaten Dati II Lombok Barat).

Dari tabel VII di atas, sudah jelas bahwa jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Lombok Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1991 jumlah wisatawananya 165.113 orang, dan tahun 1993 meningkat menjadi 190.756 orang. Akan tetapi pada tahun 1994 jumlah angka wisatawan kembali turun menjadi 143.500 orang. Hal ini dirasakan wajar karena sebelumnya kabupaten Lombok Barat yang membawahi 12 kecamatan, dan tahun 1994 berkurang menjadi 9 kecamatan.

Di dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan, Pemerintah Daerah tingkat II telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan sarana penunjang.
- b. Mengembangkan obyek-obyek wisata yang telah ada, dan hal ini diadakan agar para wisatawan yang datang merasa betah / kerasan tinggal di kabupaten Lombok Barat.

(hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata tingkat II Lombok Barat)

Untuk menunjang arus wisatawan yang setiap tahun terus meningkat, kabupaten Lombok Barat telah menyediakan 110 hotel berbintang dan non-

bintang. Ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VIII

Jumlah akomodasi di Kabupaten Lombok Barat.

no.	Kecamatan	Hotel		Pondok Wisata
		Bintang	Melati	
1	Gunung Sari	10	19	1
2	Tanjung	2	8	63
3	Narmada	2	-	2
4	Gerung	-	2	1
5	Sekotong	-	2	-
6	Bayan	-	-	7
7	Kediri	-	-	-
8	Gangga	-	-	-
9	Lauapi	-	-	-
jumlah =		14	31	73

(Sumber data: Dinas Pariwisata Daerah tingkat II Lombok Barat)

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa jumlah akomodasi di kabupaten Lombok Barat masih didominasi oleh kecamatan Gunung Sari dan Tanjung, dimana hotel berbintang masih berpusat di dua kecamatan tersebut, yakni Gunung Sari 71,43%, begitu pula dengan hotel Melatinya (61,29 %).

Sedangkan untuk pondok wisata sebagian besar berpusat di kecamatan Tanjung (66,3 %).

Dan untuk mengetahui perkembangan akomodasi di kabupaten Lombok Barat, penulis dapat menjelaskan dari tahun 1992, yaitu :

- a. Pada tahun 1992, jumlah hotel berbintang sebanyak 8 unit dengan kamar 507 buah dan tempat tidur 959 buah. Sedangkan untuk hotel non-bintang baru berjumlah 80 unit dengan kamar sebanyak 665 buah dan tempat tidur 1239 buah.
- b. Tahun 1993, jumlah hotel berbintang sebanyak 8 unit dengan kamar 707 buah dan tempat tidur 1040 buah, sedangkan hotel non-bintang berjumlah 94 unit dengan kamar 766 buah dan tempat tidur sebanyak 1417 buah.
- c. Tahun 1994, jumlah hotel berbintang bertambah menjadi 12 buah unit dengan kamar 737 buah dan tempat tidur 1194 buah, sedangkan hotel non-bintang berjumlah 104 unit dengan kamar 835 buah dan tempat tidur 1524 buah.

(Sumber data: Monografi kabupaten Lombok Barat tahun 1994/1995)

Berdasarkan surat keputusan bupati di Lombok Barat nomor 1474 tahun 1995, telah ditetapkan obyek-obyek wisata di kabupaten Lombok

Barat terdiri dari: wisata alam sebanyak 10 buah, wisata Bahari 11 buah, wisata Budaya 5 buah dan wisata Sejarah sebanyak 6 buah yang tersebar di seluruh kecamatan di Lombok Barat.

Bila dibandingkan dengan perkembangan obyek-obyek wisata pada tahun sebelumnya, maka tidak akan terlihat perubahan dari segi jumlah obyeknya. hanya saja perkembangan obyek - obyek wisata yang ada dapat dilihat dari berkembangnya pembangunan lokasi obyek-obyek wisata yang ada dan meningkatnya prasarana-prasarana penunjang wisata seperti; diadakannya perahu dayung, perahu-perahu bebek dan lain-lain.

Setelah tercanangnya pariwisata di kabupaten Lombok Barat, maka Pendapatan Asli Daerah daerah tingkat II ini semakin meningkat, dan dengan sendirinya devisa negara juga semakin bertambah. Begitu pula dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang lain seperti; sarana dan prasarana perhubungan darat, perhubungan udara, perhubungan laut, sarana komunikasi, art shop dan sarana money changer.

Perkembangan pariwisata di kabupaten Lombok Barat sampai saat ini merupakan tolak ukur keberhasilan pariwisata di propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), hal ini dikarenakan obyek - obyek

wisata, fasilitas wisata, sarana dan prasarana - yang ada masih didominasi oleh kabupaten Lombok Barat. (Sumber data : hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata tingkat II Lombok Barat)

2. Potensi Pariwisata kabupaten Lombok Barat

Perkembangan pariwisata di Lombok Barat pada akhir-akhir ini sangat pesat dan manfaatnya telah dapat dirasakan. Hal ini sebagai hasil usaha keras yang ada dan penyediaan sarana dan prasarana obyek-obyek wisata yang dimaksud.

Adapun potensi-potensi pariwisata yang ada dan yang akan dikembangkan, meliputi :

a. Potensi Alam, seperti: iklim, flora, fauna, pantai, gunung dan danau, antara lain :

- 1) Air terjun Tiu Pupus, Krakas di kecamatan Gangga.
- 2) Pantai Malimbu di kecamatan Gunung Sari.
- 3) Hutan lindung Sesaot dan Suranadi di kecamatan Narmada.
- 4) Waduk Bengkang di kecamatan Sekotong.
- 5) Pantai Cemara Tebel di kecamatan Gerung.

b. Kekayaan seni dan budaya tradisional yang spesifik, meliputi : Farian Gendang Belek , Oncer, Gandrung, Tawak-tawak, Tambur dan Esot-esot yang berada di kecamatan Narmada ,

Labuapi dan Kediri.

- c. Peninggalan kuno yang mempunyai nilai sejarah seperti :
- 1) Makam keramat Belongos di kecamatan Gerung
 - 2) Makam Raja Kedaro di kecamatan Sekotong.
- d. Letak geografis Lombok Barat yang sangat menguntungkan, yaitu berada pada segi tiga emas antara pulau Bali di sebelah barat, Taman Nasional pulau Komodo di sebelah Timur, dan Toraja di sebelah Utara.

Pemerintah Daerah kabupaten Dati II Lombok Barat dengan surat keputusan bupati Kepala Daerah tingkat II Lombok Barat nomor 1474 tahun 1995 telah menetapkan obyek-obyek wisata di kabupaten Lombok Barat sebagai pusat-pusat wisata adalah sebagai berikut :

- a. Pantai Senggigi dan sekitarnya,
- b. Batu Bolong,
- c. Pantai Mangsit,
- d. Hutan wisata Pusuk,
- e. Gili Terawangan, Gili Meno dan Gili Air (TRAMENA),
- f. Pura Lingsar,
- g. Narmada,
- h. Suranadi,
- i. Desa Banyumulek,
- j. Pantai Sire,
- k. Pura Agung Gunung Sari,
- l. Air terjun Sonae,
- m. Air terjun Singgang Gile,
- n. Desa Senaru,
- o. Bangko-bangko,
- p. Karang Bagu,
- q. Desa Sesela,

- r. Gunung Pengsong,
- s. Masjid kuno Bayan dan
- t. Aik Nyet.

(Sumber data: Dinas Pariwisata Daerah tingkat II Lombok Barat)

3. Dampak Pariwisata di kabupaten Lombok Barat

Pariwisata di kabupaten Dati II Lombok Barat merupakan salah sektor yang perlu dikembangkan disamping sektor-sektor lainnya, seperti sektor pertanian, industri, pertambangan dan lain lainnya. Oleh karena itu pengembangan pariwisata di sini adalah segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait untuk menggali serta memanfaatkan dan meningkatkan potensi alam serta budaya, sarana dan prasarana, sehingga memberikan kemudahan, kenikmatan, kenyamanan dan kepuasan bagi wisatawan yang datang. Dan pada akhirnya memberi manfaat dan keuntungan bagi daerah tingkat II Lombok Barat, masyarakat pada umumnya dan yang lebih khusus lagi bagi sektor-sektor lainnya.

Kegiatan dan pengembangan pariwisata juga melibatkan berbagai sektor kehidupan, dimana pariwisata di Lombok Barat mempunyai pengaruh atau dampak yang cukup luas, baik dampak positif maupun dampak negatif.

a. Dampak Positif

Dampak positif dari pariwisata di Kabupaten Lombok Barat dapat dilinat dari enam segi, yaitu :

1) Segi Sosial Budaya

Dilinat dari segi sosial budaya ini, pariwisata telah dapat melestarikan warisan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat, meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat dan telah menghidupkan kegiatan-kegiatan sentral seperti seni tari dan sebagainya.

2) Segi Ekonomi

Dari segi ini pariwisata telah meningkatkan sumber pendapatan Asli Daerah Lombok Barat, meningkatkan devisa negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan mendorong penanaman modal asing (swasta).

3) Segi Lingkungan

Dampak positifnya yaitu ditatanya obyek-obyek wisata yang telah tersedia, diadakannya pelestarian pantai-pantai seperti melestarikan trumbu-trumbu karang agar tidak cepat punah, dan telah diterapkannya prinsip sapta pesona yang meliputi: aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah dan kenangan.

4) Segi Politik

Yaitu memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa, tumbuhnya rasa cinta tanah air, dan terpeliharanya hubungan antar negara (internasional).

5) Segi Pembangunan

Dalam segi pembangunan akan terlihat dari tumbuh pesatnya hotel-hotel berbintang, berdirinya pemukiman pusat-pusat perbelanjaan, restoran dan lain-lain.

6) Segi Keagamaan

Dari segi ini terlihat dalam terencanaannya jum'at bersih oleh pemerintah daerah Lombok Barat, terbentuknya kelompok kerja dari yayasan-yayasan Islam dan remaja-remaja masjid untuk membuat kerajinan-kerajinan dalam mendukung pariwisata, diadakannya wisata ziarah dan diikuti serentakannya satri-santri pondok pesantren sebagai "guide" bagi tamu-tamu pemerintah.

(Sumber: wawancara dengan Kepala Dinas pariwisata tingkat II Lombok Barat)

b. Dampak Negatif

Untuk dampak negatif pariwisata di kabupaten Lombok Barat dari :

1) Kurangnya penghargaan seni budaya daerah

dan sering terjadinya kasus-kasus pengerusakan dan pencemaran pninggalan-peninggalan di daerah Lombok Barat.

- 2) Timbulnya tindak kekerasan dan tindak pidana dalam masyarakat, seperti: pencurian, perampokan, pemunuhan dan pemerkosaa.
- 3) Terjadinya pengalihan profesi diantara masyarakat setempat, misalnya dari seorang petani / nelayan menjadi pengusaha kecil-kecilan dengan membuka warung atau art shop-art shop.
- 4) Berkurangnya nilai-nilai agama dari masyarakat setempat, terutama masyarakat awam, dimana dalam hal ini sering terjadi karena kurangnya persiapan mental mereka.
- 5) Terjadinya persaingan harga para pedagang kecil di kalangan masyarakat awam, yang diakibatkan kebutuhan mereka yang semakin tinggi.
- 6) Sering terjadinya transaksi jual beli yang tidak benar, seperti jual beli buah-buahan yang masih kecil dan masih berada di pohon.
(keterangan : dari sumber sekunder)

C. Pendapatan Daerah tingkat II kabupaten Lombok Barat

1. Sumber - sumber Pendapatan Daerah tingkat II

Lombok Barat

Pendapatan Daerah tingkat II Lombok Barat, bersumber dari tiga bagian, yaitu :

a. Bagian Pendapatan Asli Daerah, ini terdiri dari 5 sektor, yaitu :

1) Pajak Daerah

Yang dimaksud dengan pajak daerah di sini adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah, dan pungutan ini dikenakan kepada semua obyek-obyek pajak seperti orang / badan, dan benda bergerak / tidak bergerak. Sektor pajak daerah tingkat II kabupaten Lombok Barat meliputi :

- pajak potong newan
- pajak pembangunan I
- pajak radio
- pajak bangsa asing (PBA)
- pajak keramaian
- pajak reklame / pariwisata
- pajak kendaraan tidak bermotor
- pajak penerangan jalan (PPJ)
- pajak pendaftaran perusahaan daerah.

2) Retrebusi Daerah

Retrebusi di sini mempunyai arti pungutan daerah sebagai pembayar/ pemakai karena memperoleh jasa yang diberikan daerah. Retrebusi daerah tingkat II Lombok

Barat meliputi, Retrebusi :

- uang leges
- ijin klas jajan IV dan V
- uang parkir
- pemeriksaan potong hewan
- sewa toko / tanah / bangunan
- ijin bangunan
- uang atas pemakaian tanah pemerintah daerah
- stasiun bus / taxi / TPR
- RSUD / BP / Puskesmas
- cukai pasar umum
- pesanggrahan
- atas hasil hutan
- kependudukan / KTP
- pemilikan kartu ternak
- pasar hewan / jual beli hewan
- bebinin / huller
- pengambilan sarang burung
- alat-alat berat
- kebersihan sampah
- ijin trayek / operasi
- biaya lelang
- STNK / TB
- timbangan hewan
- ijin lokasi
- ijin HO
- surat ijin mendirikan perusahaan angkutan (SIPA)
- bengkel kendaraan bermotor
- pengerukan / penyedotan kakus
- penerangan jalan umum
- sewa barang inventaris kantor / sewa rumah
- pemeriksaan hewan yang keluar masuk daerah
- galian C

3) Perusahaan daerah

Yaitu penerimaan dari perusahaan-perusahaan milik pemerintah daerah seperti :

- a. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

4) Dinas-dinas Daerah

Penerimaan daerah yang bukan pajak dan retrebusi, yang meliputi :

- a) Dinas pekerjaan umum tingkat II
- b) Dinas pertanian tingkat II
- c) Dinas perkebunan tingkat II
- d) Dinas peternakan tingkat II
- e) Dinas perikanan tingkat II

5) Penerimaan lain-lain

Yaitu penerimaan daerah yang bukan pajak dan retrebusi, meliputi :

- a) penerimaan jasa giro
- b) sumbangan pinak III
- c) Hasil penjualan milik daerah
- d) Hasil dari KTP
- e) penerimaan lain-lain

b. Bagi Hasil Pajak / bukan Pajak

1) Bagi hasil pajak yaitu pajak yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah propinsi daerah tingkat I, yang kemudian hasil pajak tersebut diserahkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah propinsi untuk kemudian dibagi hasilnya kepada daerah-daerah tingkat II. Bagi hasil pajak ini terdiri dari :

- a) pajak bumi dan bangunan (PBB)
- b) BBNKB / PKB

2) Bagi hasil bukan pajak, ini terdiri dari :

- a) iuran hasil hutan (IHH)
- b) pemberian nak atas tanah pemerintah daerah
- c) land rent

- d) galian C
- e) bagi hasil surat ijin usaha
- f) bagi hasil pusat kesehatan hewan

c. Bagian sumbangan dan bantuan

1) Sumbangan

Yang dimaksud dengan sumbangan di sini ialah Pendapatan Daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan atau pemerintah Daerah tingkat I, serta sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

2) Bantuan

Adalah semua jenis bantuan atas instruksi presiden (inpres) yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah tingkat II, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah tingkat II.

2. Pendapatan Daerah dari sektor Pariwisata

Dalam lima tahun terakhir sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial di dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama dari pajak pembangunan I-nya.

Dengan dicanangkannya sektor pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah setelah pertanian, pemerintah daerah Lombok Barat terus mengupayakan pengembangan

pembangunan kepariwisataan seperti pembangunan hotel-hotel (rumah penginapan), restoran-restoran (rumah makan / minum) dan pembangunan obyek-obyek wisata yang telah ada, dan pengembangan sarana-sarana wisata lainnya.

Hubungannya dengan peningkatan Pendapatan Daerah sangat besar sekali yaitu melalui pajak pembangunan dan pembayaran retrebusi pesanggrahannya.

Pajak pembangunan I adalah pungutan daerah yang diperoleh dari rumah-rumah penginapan, rumah-rumah makan dan atau minuman yang diatur dalam peraturan daerah Lombok Barat nomor 2 tahun 1984. Sedangkan yang dimaksud dengan retrebusi pesanggrahan adalah pungutan daerah yang diperoleh sebagai pembayaran / pemakaian jasa yang diberikan oleh daerah yang berupa taman rekreasi dan pemandian, yang diatur dalam peraturan daerah Lombok Barat nomor 1 tahun 1992.

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak pembangunan I dan retrebusi pesanggrahan adalah:

a. Pajak Pembangunan I, yaitu :

- 1) Bangunannya berupa rumah penginapan, rumah makan dan atau minum.
- 2) Pembayaran harus berupa sejumlah uang.
- 3) Pembayaran dilakukan oleh pengunjung yang

menginap, membeli makanan dan atau minuman sebesar 10 %.

b. Retrebusi Pesanggrahan, yaitu :

- 1) Lokasinya harus berupa suatu kawasan yang mempunyai keindahan alam maupun lainnya.
- 2) Pembayaranannya harus berupa sejumlah uang.
- 3) Pembayaranannya dikenakan bagi pengunjung yang masuk ke taman rekreasi dan pemandian.

Dari uraian di atas, telah dijelaskan tentang syarat-syarat pemungutan pajak pembangunan I dan retrebusi pesanggrahan. Perlu untuk diketahui bahwa jumlah lokasi pemungutannya tersebar di wilayah kabupaten Lombok Barat yaitu di kecamatan Gunung Sari, kecamatan Tanjung, kecamatan Narmada, kecamatan Gerung, kecamatan Sekotong, kecamatan Bayan, kecamatan Kediri dan kecamatan Labuapi. Dan dari 8 kecamatan yang ada, jumlah tempat pemungutan pajak pembangunan I ada 221 buah yang terdiri dari 14 hotel berbintang, 31 hotel melati, 73 pondok wisata dan 103 restoran / rumah makan. Sedangkan jumlah tempat pemungutan retrebusi pesanggrahan yang meliputi taman rekreasi dan pemandian terletak di Narmada yaitu Taman Narmada dan Pura Mayura.

Pendapatan Daerah dari sektor pariwisata terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring

dengan derasnya arus wisatawan yang datang ke kabupaten Lombok Barat dan berkembangnya sarana-sarana akomodasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sektor pariwisata, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IX

Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah tingkat II Lombok Barat selama 5 tahun dari pajak pembangunan I

no.	Tahun anggaran	jumlah
1	1991 / 1992	1.128.201.964,08
2	1992 / 1993	1.644.276.606,29
3	1993 / 1994	2.125.029.565,80
4	1994 / 1995	2.977.419.987,12
5	1995 / 1996	3.272.192.771,88

(Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah tingkat II Lombok Barat)

TABEL X

Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah tingkat II Lombok Barat selama 5 tahun

dari retrebusi pesanggrahan

no.	Tahun anggaran	jumlah
1	1991 / 1992	40.200.300
2	1992 / 1993	62.934.350
3	1993 / 1994	49.268.650
4	1994 / 1995	48.668.400
5	1995 / 1996	62.176.300

(Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah tingkat II Lombok Barat)

Dari tabel IX, dijelaskan bahwa jumlah penerimadari pajak pembangunan I selama periode 5 tahun terus meningkat. Yang semulanya tahun 1991 / 1992 berjumlah 1.128.201.964,08 menjadi 3.272.192.771,88 pada tahun anggaran 1995 / 1996.

Dan dari tabel X, dijelaskan juga bahwa jumlah penerimaan retrebusi pesanggrahan terus meningkat. Dimana pada tahun anggara 1991 / 1992 berjumlah 40.200.300 menjadi 62.176.300 pada tahun 1995 / 1996, meskipun pada tahun sebelumnya pernah mengalami penurunan.

3. Tata laksana Pemungutan Pendapatan Daerah dari sektor Pariwisata

Di dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah baik dari sektor pariwisata, ataupun dari sektor-sektor lainnya, bagian keuangan Daerah tingkat II telah memberikan kepercayaan kepada instansi-instansi bawahannya, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah tingkat II. Oleh sebab itu, aparat pemerintah yang berada di Dinas Pendapatan Daerah tingkat II inilah yang turun langsung ke lapangan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah, yang kemudian diserahkan kepada bagian keuangan.

Kaitannya dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata, aparat pemerintah Dinas Pendapatan Daerah telah membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 6 orang dan dinamakan dengan "Mentari". Mentari di sini kependekan dari kata: menagih, mendata setiap hari. Sesuai dengan sebutan kelompok pemungutan pajak dan retribusi tersebut, maka pemungutannya dilaksanakan setiap hari kerja.

Dalam hubungannya dengan pemungutan pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata, aparat pemerintah Dinas Pendapatan Daerah telah membentuk kelompok-kelompok dengan tujuan untuk mempermudah pemungutan pajak pembangunan I dan retribusi pesanggrahan. Kelompok-kelompok terse-

but adalah kelompok mentari yaitu kelompok dari pinak pemerintah daerah yang terdiri dari enam orang dan mempunyai tugas untuk menagih, mendata setiap hari. Sedangkan kelompok kedua adalah dari pinak pengusaha rumah penginapan, rumah makan dan atau minuman yang disebut dengan Wapu (wajib pungut).

Untuk proses pemungutannya, kelompok mentari turun langsung ke lapangan untuk menagih pembayaran pajak dan retrebusi, dan mendata berapa jumlah pengunjunnya / tamu, berapa tarip pembayaran kamar, makanan dan atau minuman. Di sini wapu (wajib pungut) mempunyai tugas memungut pajak dari para pengunjung, setelah mereka (wapu) memungut pajak tersebut, kemudian ia memberikan laporan dan membayar kepada pihak pemerintah (kelompok mentari) dengan dasar memperhitungkan berapa yang sudah ia (wapu) pungut. Apabila wapu enggan melaksanakan tugasnya, maka wapu itu sendiri yang menanggung pembayaran pajak tersebut, dan ia dikenakan denda administratif 10 % tiap bulan, dihitung dari jumlah yang terhitung. (Hasil wawancara dengan aparat Dinas Pendapatan Daerah tingkat II Lombok Barat)

Pembayaran pajak pembahgunan I diperoleh dari para pengunjung rumah penginapan, rumah

makan dan atau minuman. Sebagai bukti pembayaran dari mereka, pemerintah daerah telah menyediakan tanda bukti pembayaran yang sah yang telah dicap dengan cap daerah. Dan untuk selanjutnya, pihak wapu harus menyimpan semua lampiran - lampiran surat-surat pesanan dan pembayaran tersebut untuk waktu 3 (tiga) tahun. Dan apabila ia (wapu) melalaikan tugas tersebut, maka ia akan dikenakan sanksi berupa tahanan penjara selama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000 ,--.

Sedangkan untuk pemungutan retrebusi pesanggrahan, pihak mentari hanya mendatangi petugas yang sudah ditugaskan ditempat tersebut untuk mendata jumlah pengunjung yang datang ke tempat rekreasi dan kemudian memberikan upah atas pekerjaannya sebesar 5 % dari seluruh penerimaan yang disetorkan. Dan pembayaran retrebusi pesanggrahan ini diperoleh melalui para pengunjung yang masuk ke taman rekreasi dengan cara membeli karcis masuk sebesar Rp. 200,- untuk orang dewasa dan Rp. 100,- untuk anak-anak, dan pengunjung yang masuk ke tempat pemandian sebesar Rp. 300,- untuk orang dewasa dan Rp. 150,- untuk anak-anak.

4. Penyaluran dan pemanfaatan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lombok Barat

Kebijaksanaan keuangan daerah di bidang penerimaan diarahkan pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai rumah tangga sendiri melalui penggalan dan mobilisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah,
- b. Bagi hasil pajak / bukan pajak dan
- c. Sumbangan / bantuan pemerintah atasan.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut selama 5 tahun terakhir terlihat adanya peningkatan realisasi yang cukup dinamis yaitu: Pendapatan Asli Daerah meningkat rata-rata 14,39 % / tahun, bagi hasil pajak / bukan pajak meningkat rata-rata 16,52 % pertahun, dan sumbangan atau bantuan meningkat rata-rata 5,79 % pertahun.

Dari posisi PAD tersebut, telah dapat menutupi kebutuhan belanja rutin non gaji bahkan sebagian dapat disisihkan untuk tambahan belanja pembangunan yaitu rata-rata 12,16 % dari total PAD pertahun. Dengan kata lain bahwa seluruh sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak / bukan pajak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan, walaupun diijinkan untuk digunakan pada belanja rutin.

Adapun realisasi belanja pengeluaran rutin dan pembangunan daerah tingkat II Lombok Barat

pada tahun 1995 / 1996 adalah sebesar :
Rp. 30.487.481.273,91 atau 79,92 % dari rencana
sebesar Rp. 38.148.896.688,45. Dengan rincian
sebagai berikut :

- a. Realisasi belanja rutin sebesar Rp. 22.845.099.305,91 atau 93 % dari rencana sebesar Rp. 24.423.327.032,45.
- b. Realisasi belanja / pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 7.642.331.968 atau 55,68 % dari rencana sebesar Rp. 13.725.569.656, diperkirakan sampai dengan akhir tahun anggaran mencapai 100 %.

(Sumber : keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah tingkat II Lombok Barat)

Dari uraian di atas, sudah jelas bahwa belanja rutin kabupaten Lombok Barat pada tahun 1995 / 1996 sebesar Rp. 22.845.099.305,91 dan untuk belanja pembangunannya sebesar Rp. 7.642.331.968. Sedangkan untuk pemanfaatannya, pemerintah daerah Lombok Barat telah menetapkan pos-pos yang berhak menerimanya, yaitu :

- a. Belanja rutin, diarahkan untuk: Belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, belanja lain-lain, angsuran pinjaman / hutang dan bunga, belanja pensiun, ganjaran, subsidi / sumbangan kepada daerah bawahan, pengeluaran yang tidak terma-

suk bagian lain dan pengeluaran tidak tersangka.

b. Belanja / pengeluaran Pembangunan, diarahkan untuk :

- 1). Pertanian dan pengairan
- 2). Industri
- 3). Pertambangan dan energi
- 4). Perhubungan dan pariwisata
- 5). Perdagangan dan koperasi
- 6). Tenaga kerja dan transmigrasi
- 7). Pemoangunan Daerah
- 8). Agama
- 9). Pendidikan generasi muda, kebudayaan Nasional, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
- 10). Kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, kependudukan dan keluarga berencana
- 11). Perumahan rakyat dan pemukiman
- 12). Hukum
- 13). Keamanan dan ketertioan umum
- 14). Penerangan, pers, dan komunikasi
- 15). Ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian
- 16). Aparatur pemerintahan
- 17). Pengembangan dunia usaha
- 18). Sumber alam dan lingkungan hidup

19). Subsidi / bantuan pembangunan kepada -
Daerah bawahan untuk menyelenggarakan
pemerintahan di Daerah yang berasal
dari pajak dan retrebusi Daerah

20). Pembayaran kembali pinjaman.

(Hasil wawancara dengan aparat Dinas Pendapa-
tan Daerah tingkat II Lombok Barat)